

## HADAPI BENCANA HIDROMETEOROLOGI

# BPBD DIY Mengimbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

**YOGYA (KR)** - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama saat musim hujan. Hal itu karena bencana alam seperti angin kencang, banjir dan tanah longsor lebih berpotensi terjadi saat musim penghujan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi cuaca dari BMKG dan mengikuti arahan dari petugas. Dengan begitu mereka bisa tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Noviar Rahmad di Yogyakarta, Minggu (3/11).

Noviar mengatakan, hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi di DIY pada Minggu (3/11) telah mengakibatkan kerusakan di sejumlah titik, terutama di Kabupaten Sleman dan Kulonprogo. Kerusakan terparah terjadi di Kapanewon Pakem, di mana puluhan rumah mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon tumbang.

Dampak terparah tercatat di Kapanewon Pakem, dengan 10 titik kerusakan di Kalurahan Pakembinangun tiga titik di Kalurahan Harjobinangun dan 1 titik di Kalurahan Hargobinangun. Selain itu, kerusakan juga terjadi di Kapanewon Ngeplak dan Cangkringan. Sedangkan di Kulonprogo sejumlah pohon besar tumbang menimpa rumah warga, jaringan listrik, dan jalan. Beberapa lokasi yang terdampak antara lain di wilayah Beji, Kembang,

Gunung Pentul, dan Hargowilis. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kerugian materi akibat kerusakan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur diperkirakan mencapai jutaan rupiah.

"BPBD DIY bersama dengan pemerintah daerah telah melakukan assesment dan memberikan bantuan darurat kepada warga yang terdampak.

Selain itu, petugas PLN juga bekerja keras untuk memperbaiki jaringan listrik yang terputus," terangnya. **(Ria)-f**

## DUKUNG UPAYA PELESTARIAN

# Pemkot Imbau Warga Daftarkan Naskah Kuno

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya mengimbau masyarakat untuk mendaftarkan naskah kuno yang dimilikinya. Pendaftaran dapat dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogya sebagai bentuk upaya pelestarian.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto, mengungkapkan naskah menjadi sumber informasi yang berharga dalam rangka memahami peradaban, budaya dan sejarah bangsa. Tidak hanya mencerminkan cara berpikir pada sejarah masa lalu tapi juga merekam peristiwa penting yang membentuk identitas dan tradisi budaya. "Naskah kuno juga sebagai jembatan antar generasi untuk mengakses pemikiran di masa lalu. Selain itu dalam rangka memberikan wawasan tentang nilai-nilai dan norma sosial melalui naskah kuno diharapkan kita bisa memahami perkembangan bahasa, sastra dan bahkan sistem pemerintahan. Alangkah baiknya jika di wilayah masyarakat ada yang memiliki untuk segera didaftarkan," urainya, Minggu (3/11).

Merujuk undang-undang, Perpustakaan Nasional menempatkan pelestarian dan pengembangan, pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah kuno nusantara menjadi salah satu sasaran strategi pembangunan secara literasi tahun 2025-2029. Pada tingkat Kota Yogya, Pemkot telah menetapkan

Perda 11/2022 tentang Perpustakaan dan Perwal nomor 24/2024 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Termasuk juga Kepwal 306/2024 terkait penetapan petunjuk teknis pendaftaran, pemberian penghargaan, perlindungan dan pendayagunaan naskah kuno. "Adanya beberapa regulasi ini tentunya harapan kita menjadi satu bukti bahwa naskah kuno di Kota Yogya harus dilindungi dan dilestarikan. Di sisi lain masyarakat wajib mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki kepada pemerintah sebagai upaya bersama-sama melestarikan dan mendayagunakan untuk kepentingan kita bersama," imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogya Afia Rosdiana, melestarikan naskah kuno menjadi salah satu tugas perpustakaan. Sejak layanan Gantari diluncurkan akhir September, salah satu layanannya yaitu katalog naskah kuno yang mampu menghimpun koleksi naskah kuno tidak hanya dari DIY, tapi juga dari Banten. "Harapannya ada peningkatan pemahaman khususnya kesadaran bagi kita tentang arti penting dari naskah nusantara. Naskah kuno di lembaga seperti Kraton, Puro Pakualaman, Balai Bahasa sudah terkelola dengan baik. Yang menjadi tantangan adalah naskah-naskah kuno atau nusantara di masyarakat," tandasnya. **(Dhi)-f**

## DHIAN NOVITASARI, FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD KOTA YOGYAKARTA Kolaborasi Program Makan Bergizi Gandeng UMKM se Yogya



KOTA YOGYAKARTA

**YOGYA (KR)** - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pasangan Prabowo-Gibran telah resmi masuk dalam pembahasan anggaran 2025. Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan tim transisi Prabowo-Gibran telah mengalokasikan Rp 71 T untuk program MBG tahap pertama pada 2025.

Anggaran ini direncanakan dengan mempertimbangkan target defisit fiskal sebesar 2,29% - 2,82%. Tahap awal program MBG terutama akan menyasar siswa SD, SMP, dan SMA yang termasuk dalam kuartil pertama dan kedua di daerah tertinggal, terluar, dan terpercipi (3T) di Indonesia. Sasaran, anggaran, dan tata kelola program akan terus dikaji dan disempurnakan guna menanggulangi stunting di Indonesia.

Sebagai wakil rakyat, saya berharap inisiatif ini akan terlaksana pada tahun 2025 untuk merangsang pembangunan ekonomi lokal dan memberdayakan sektor-sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan ritel lokal sebagai persiapan untuk program MBG. Integrasi pangan berkelanjutan akan dicapai melalui perluasan target secara bertahap. Termasuk juga dengan menggandeng para pelaku

UMKM se Kota Yogya untuk dilibatkan dalam program tersebut.

Penanganan masalah gizi, khususnya stunting di DIY, terkait erat dengan akses terhadap air minum bersih, sanitasi dasar, pendapatan yang memadai, dan pendidikan yang melibatkan banyak sektor. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi stunting secara efektif.

Dengan demikian, pencapaian tujuan program MBG akan menjadi tantangan jika dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang terpisah-pisah. Harus ada koordinasi dan kolaborasi yang kuat antar kementerian dan lembaga, dengan peran yang ditetapkan dengan baik. Mengingat pem-

bentukan lembaga-lembaga baru dapat menyebabkan inefisiensi, program MBG memerlukan kolaborasi yang kohesif antara berbagai tingkatan pemerintah dan entitas non pemerintah, dengan fokus utama pada peningkatan kesehatan. Kementerian dan lembaga utama yang harus dilibatkan di tingkat pusat meliputi, tetapi tidak terbatas pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Bappenas, dan BPOM, hingga pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilan program makanan bergizi gratis dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

**(Dhi)-f**



KR-Ardhi Wahdan

## WAJAH BARU ALAT KELENGKAPAN DPRD KOTA YOGYAKARTA

# Terbentuk, Komisi B Siap 'Berlari' Awasi Optimalisasi PAD



KOTA YOGYAKARTA

**YOGYA (KR)** - Komisi B menjadi salah satu alat perlengkapan (alkap) DPRD Kota Yogyakarta yang memiliki ketugasan strategis. Hal ini tak lepas dari tupoksinya dalam mengawal urusan ekonomi yang dijalankan oleh tim eksekutif. Seiring terbentuknya jajaran unsur pimpinan dan

Sigit Nurcahyo (Fraksi PDI Perjuangan), Oleg Yohan (Fraksi NasDem), Krisnadi Setyawan (Fraksi Gerindra), Fajar Kurniawan (Fraksi PKS), dan I Dewa Putu Adhi Yogana (Fraksi PPP).

Ketugasan Komisi B pada urusan perekonomian dan keuangan memang cukup strategis. Tanpa mengesampingkan aspek lainnya, aktivitas perekonomian cukup



Ketua Komisi B, Mohammad Sofyan

KR-Ardhi Wahdan

Wakil Ketua Komisi B, Danang Rudiymoko

KR-Ardhi Wahdan

Sekretaris Komisi B, Munazar

KR-Ardhi Wahdan



Ipung Purwandari



Sigit Nurcahyo



Oleg Yohan



Krisnadi Setyawan



I Dewa Putu Adhi Yogana



Fajar Kurniawan

anggota, Komisi B pun siap berlari dalam mengawasi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Jajaran pimpinan dan anggota Komisi B yang telah ditetapkan pekan lalu berjumlah sembilan orang. Seluruhnya merupakan wakil dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kota Yogyakarta masa jabatan 2024-2029. Terdiri dari Ketua Mohammad Sofyan (Fraksi PAN), Wakil Ketua Danang Rudiymoko (Fraksi PDI Perjuangan), Sekretaris Munazar (Fraksi Golkar) serta jajaran anggota Ipung Purwandari (Fraksi PDI Perjuangan),

berpengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mitra kerja Komisi B hampir menyetujui semua dinas yang berkaitan dengan pendapatan. Dalam menjalankan fungsinya, Komisi B akan lebih banyak melakukan koordinasi dengan mitra kerja. Tinjauan ke wilayah juga bakal kerap dilakukan guna memastikan program pemerintah di bidang ekonomi berjalan dengan baik.

Ketua Komisi B Mohammad Sofyan, mengungkapkan ketugasan pertama yang akan dilakukannya

ialah pembahasan RAPBD Kota Yogya tahun 2025 bersama mitra kerja eksekutif. "Kami akan fokus mencermati industri pariwisata dan berbagai turunannya serta PAD. Sektor ekonomi di Kota Yogya banyak ditopang oleh industri pariwisata mulai dari akomodasi, transportasi hingga pelaku UMKM. Menggeliatnya tingkat kunjungan wisatawan diharapkan mampu meningkatkan perputaran uang yang dirasakan hingga lapisan masyarakat paling bawah. Kondisi tersebut pun idealnya turut mendorong PAD," urainya.

Dicontohkannya meningkatnya kunjungan wisatawan selama ini banyak dirasakan manfaatnya oleh kalangan perhotelan, restoran, destinasi wisata, jasa parkir, toko oleh-oleh, jasa transportasi dan lainnya. Akan tetapi pasar tradisional juga memiliki potensi yang tidak kalah menarik untuk menjadi jujugan wisatawan. Terutama pasar yang terletak di kawasan premium atau pusat kota dan berdekatan dengan destinasi wisata. Komisi B akan mengusulkan ada standarisasi pasar tradisional dengan mengedepankan kearifan lokal. Sehingga dalam melakukan

penataan ada pedoman dari sisi display dagangan, jenis dagangan hingga konsep bangunan fisik.

Secara bertahap, seluruh pasar di Kota Yogyakarta yang kini berjumlah 29 pasar perlu upaya penataan yang berkesinambungan. Penataan itu tidak harus dengan merogoh kocek APBD melainkan mengakses berbagai pos pendanaan lain. Seperti halnya rehabilitasi Pasar Sentul yang tahun lalu dialokasikan dari dana keistimewaan maupun revitalisasi Pasar Prawirotaman beberapa tahun lalu yang seluruhnya dicukupi melalui Dana Alokasi

Khusus (DAK).

Begitu pula pemerataan wisatawan hingga ke perkampungan masih perlu penguatan dari pemerintah. Keberadaan kampung-kampung wisata seharusnya mampu menjadi kekuatan dan daya tarik. Apalagi saat ini tengah digencarkan sentra industri yang berbasis wilayah. Penanganan sentra industri tersebut idealnya meliputi dari hulu hingga hilir. Terutama menyangkut siapa yang menyediakan bahan baku, pihak yang melakukan produksi, proses pengemasan hingga promosi. Jika dalam sentra industri sudah mencakup

seluruh aspek itu, maka keberadaannya akan memperkuat kampung wisata.

Sedangkan terkait PAD, menurut Wakil Ketua Komisi B Danang Rudiymoko, mendapat pencerminan tersendiri. Hal ini karena pada tahun depan diwacanakan PAD mencapai Rp 1 triliun atau naik hingga Rp 300 miliar dibanding tahun ini. Pihaknya mendukung komitmen peningkatan PAD lantaran akan berdampak baik bagi kemandirian ekonomi daerah. Hanya harus dipastikan target tersebut mampu benar-benar diwujudkan melalui optimalisasi setiap potensi. **(Dhi)**